

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi di kawasan Asia telah mengalami perkembangan yang pesat, namun hal ini tidak bertahan lama karena terjadinya krisis moneter 1998. Krisis ini dipicu oleh devaluasi bath yang kemudian menular ke negara-negara yang ada di sekitarnya.¹ Hal ini menyebabkan banyak negara dan perusahaan mengalami masalah keuangan dan kebangkrutan. Negara yang terdampak meminta bantuan pada International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, bantuan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi krisis.² Hal ini menjadi motivasi untuk menjalin kerja sama keuangan di kawasan Asia, kerja sama dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak krisis ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang.³ Kerja sama ini juga dilakukan untuk meningkatkan hubungan perekonomian antar negara. Pada tahun-tahun berikutnya kerja sama finansial mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.⁴

Pengusulan pembentukan kerja sama finansial pernah diajukan oleh Jepang sebelum krisis finansial tahun 1998. Kerangka kerja ini kemudian dikenal dengan Asia Monetary Fund (AMF) yang menyediakan dana moneter hingga

¹ ADBI *Working Paper, From Chiang Mai Initiative to an Asian Monetary Fund* (Tokyo: ADBInstitute, 2015), 4.

² Aliya Nur Aziza, Audita Fathana, Ayun Faiza Yulianto, "Analisis Peran IMF terhadap Fenomena Inflasi tahun 1997-1998 di Negara Thailand," *Nation State Journal of International Studies*, volume 2, no. 1 (juni 2019): 28.

³ Chalongsob Sussangkarn, "Chiang Mai Initiative Multilateralization: Origin, Development, and Outlook," *Asian Economic Policy Review*, volume 6, no. 2 (2016): 203-204.

⁴ Shintaro Hamanaka, "Insights to Great Powers' Desire to Establish Institutions: Comparison of ADB, AMF, AMRO and AIIB," *global policy*, volume 7, issue 2 (may 2016): 288.

\$100 miliar.⁵ Namun, proposal pembentukan AMF ini ditentang keras oleh IMF dan Amerika Serikat (AS) serta tidak mendapatkan dukungan dari Tiongkok.⁶ Penolakan Tiongkok merupakan salah satu faktor terbesar dalam kegagalan AMF. Oleh karena itu, Jepang kemudian memutuskan untuk menarik kembali usulan tersebut.⁷ Pada November 1997, AS mengusulkan untuk membentuk Manila Framework Group (MFG) sebagai pengganti AMF untuk menjadi pengawas ekonomi global tanpa mekanisme bantuan finansial.⁸

Pada Mei 2000 ASEAN *Plus Three Finance Ministers' Meeting* (APT-FMM) setuju membentuk *Chiang Mai Initiative* (CMI) dengan tujuan untuk menyediakan likuiditas darurat untuk negara yang mengalami krisis mata uang.⁹ Tiongkok menunjukkan ketertarikan yang besar dan ikut berperan aktif dalam proses pembentukannya. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Tiongkok yang turut aktif dalam mengikuti pertemuan yang diadakan APT-FMM. Selain itu Tiongkok juga merupakan salah satu kontributor finansial terbesar dalam CMI. Disisi lain Tiongkok juga menginginkan IMF untuk memiliki pengaruh yang besar dalam CMI dengan tujuan untuk mengurangi dominasi Jepang. Hal ini bertentangan dengan keinginan Jepang dan negara lain yang sedang berusaha mengurangi pengaruh AS.¹⁰

⁵ William W. Grimes, "The Rise of Financial Cooperation in Asia," *The Oxford Handbook of the International Relations of Asia* (Oxfordshire, Inggris: Oxford University Press, 2014), 374.

⁶ Shigeko Hayashi, *Japan and East Asian Monetary Regionalism: Towards a Proactive Leadership Role?* (London: Routledge, 2006), 94.

⁷ Oktaviantin Sekar Dewita, "Kepentingan Tiongkok Di Balik Dukungannya Terhadap Chiang Mai Initiative Multilateralism (Cmim)," *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2016): 280.

⁸ Paul Blustein: *The Chastening: Inside The Crisis That Rocked the Global Financial System and Humbled the IMF* (New York: Public Affairs, 2003), 168.

⁹ William W. Grimes, "The Rise of Financial Cooperation in Asia," *The Oxford Handbook of the International Relations of Asia* (Oxfordshire, Inggris: Oxford University Press, 2014), 375.

¹⁰ Oktaviantin Sekar Dewita, "Kepentingan Tiongkok Di Balik Dukungannya Terhadap Chiang Mai Initiative Multilateralism (Cmim)," *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2016): 280.

Pada tahun 2010, CMI bertransformasi menjadi *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM). Tiongkok turut berperan aktif dalam proses perubahan CMI menjadi CMIM. Multilateralisasi mengubah CMI menjadi penyedia dana cadangan dengan persyaratan ketat dalam proses peminjamannya. Kontribusi finansial negara dalam CMIM merupakan isu yang kontroversial terutama antara Tiongkok dan Jepang. Negosiasi panjang terjadi dalam menentukan kontribusi dari kedua belah pihak. Negara-negara ASEAN sepakat dengan kontribusinya sebesar \$40 miliar, kemudian mendorong Negara +3 untuk turut menyetujui bagian mereka. Akhirnya Tiongkok dan Jepang sepakat dengan jumlah kontribusi masing-masing, yaitu \$76.80. Kemudian Korea Selatan dengan kontribusi sebesar \$38.40 miliar, yang mana lebih besar dari saham negara anggota ASEAN.¹¹

Saat pembentukan CMI, dibentuk juga badan pengawas yang disebut dengan *Economic Review and Policy Dialogue* (ERPD). Namun, dalam praktiknya ERPD tidak terlalu efektif karena kurangnya kekuatan yang mengikat. Maka dari itu, pada Mei 2011 dibentuklah ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO) yang pengawasannya dianggap lebih ketat.¹² Dalam proses pembentukan AMRO, diadakan negosiasi untuk menentukan kekuatan suara dari masing-masing negara di dalam AMRO. Negosiasi memakan waktu hingga 4 tahun karena Tiongkok dan Jepang yang memperebutkan bagian paling tinggi dalam AMRO. Akhirnya, posisi direktur AMRO pada tahun pertama diberikan

¹¹ ADBI *Working Paper*, *From Chiang Mai Initiative to an Asian Monetary Fund* (Tokyo: ADBInstitute, 2015), 14-16.

¹² William W. Grimes, "The Rise of Financial Cooperation in Asia," *The Oxford Handbook of the International Relations of Asia* (Oxfordshire, Inggris: Oxford University Press, 2014), 382.

kepada Tiongkok, dan tahun kedua diberikan pada Jepang dan kantor pusat AMRO dibangun di Singapura pada April 2011.¹³

Pada dasarnya, AMRO bertugas sebagai badan pengawas keuangan yang mengawasi dan mendukung operasi CMIM. Selain itu AMRO juga mengamati, menganalisis, dan meningkatkan efektivitas CMIM dengan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN+3.¹⁴ Hal ini dilakukan dengan menerapkan mekanisme pengawasan melalui deteksi risiko dini, implementasi tindakan perbaikan yang cepat, pengambilan keputusan yang tepat, melakukan pemantauan ekonomi kawasan, memberikan dukungan pada kerja sama keuangan kawasan ASEAN+3. Pembentukan AMRO merupakan salah satu tahap yang sangat penting untuk mendorong perkembangan kerja sama keuangan melalui institusi permanen.¹⁵ Tiongkok turut memberikan dukungannya terhadap pemberian status pengamat pada AMRO dalam sidang Majelis Umum PBB ke 72.¹⁶

Sejak Desember 2011, AMRO telah menyerahkan laporan pengawasan triwulan, melakukan konsultasi ekonomi dengan negara anggota CMIM dan menjalin hubungan yang baik dengan otoritas negara anggota. AMRO juga telah memperluas cakupan analisisnya hingga isu-isu tingkat sektor yang berasal dari sumber eksternal. Otoritas ASEAN+3 mendorong AMRO untuk meningkatkan kolaborasi dengan lembaga dan organisasi keuangan yang relevan, termasuk

¹³ Shintaro Hamanaka, "Insights to Great Powers' Desire to Establish Institutions: Comparison of ADB, AMF, AMRO and AIIB," *global policy*, volume 7, issue 2 (may 2016): 289.

¹⁴ ADBI *Working Paper, From Chiang Mai Initiative to an Asian Monetary Fund* (Tokyo: ADBInstitute, 2015), 11-12

¹⁵ Perpres No. 172 Tahun 2014," *Database Peraturan | JDIH BPK*, diakses October 21, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41690/perpres-no-172-tahun-2014>.

¹⁶ Statement by Mr. LI Yongsheng, "Observer Status for the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office in the General Assembly," diakses November 18, 2024, https://www.un.org/en/ga/sixth/72/pdfs/statements/asean_3/china.pdf.

ADB, IMF, dan *World Bank*. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan AMRO dan menjalin kemitraan strategis dengan lembaga serta organisasi tersebut.¹⁷ Pada tahun 2016, AMRO resmi menjadi organisasi internasional, sehingga dapat meningkatkan efektivitasnya dalam kerja sama keuangan di kawasan Asia.¹⁸

Pada saat kerja sama finansial mulai muncul di kawasan Asia, Tiongkok enggan untuk turut berpartisipasi di dalamnya. Namun tindakan ini bertolak belakang dengan dukungan yang diberikannya pada CMI. Sebelumnya, Tiongkok tidak memberikan dukungannya terhadap AMF untuk mengurangi pengaruh Jepang dalam kawasan Asia.¹⁹ Meskipun demikian, dalam pembentukan CMI Tiongkok berperan aktif di dalamnya bersama dengan Jepang. Tiongkok juga berperan dalam perubahan CMI menjadi CMIM dan turut berpartisipasi dalam pembentukan AMRO. Partisipasi Tiongkok dalam kerja sama finansial di kawasan ASEAN+3 mengindikasikan adanya kemungkinan tumpang tindih kekuasaan antara Tiongkok dan Jepang dalam kerja sama finansial di kawasan Asia. Berdasarkan tindakan Tiongkok yang mulai mengambil bagian dalam kerja sama finansial di kawasan Asia peneliti melihat bahwa Tiongkok memiliki kepentingan tersendiri yang mendasari tindakan tersebut. Maka dari itu, peneliti merasa perlu untuk menganalisis kepentingan Tiongkok dalam AMRO.

¹⁷ ADBI *Working Paper*, *From Chiang Mai Initiative to an Asian Monetary Fund* (Tokyo: ADBInstitute, 2015), 12.

¹⁸ William W. Grimes and William N. Kring, "Institutionalizing Financial Cooperation in East Asia," *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations* 26, no. 3 (September 17, 2020): 438.

¹⁹ Hyoung-kyu Chey, "The Changing Political Dynamics of East Asian Financial Cooperation: The Chiang Mai Initiative," *Asian Survey* 49, no. 3 (May 1, 2009): 459.

1.2 Rumusan Masalah

Krisis finansial 1998 telah menimbulkan kesadaran pada negara-negara di kawasan Asia mengenai pentingnya menjalin kerja sama finansial. Pada mulanya Tiongkok tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap kerja sama yang muncul di kawasan Asia, hal ini dibuktikan dengan tindakannya yang menolak memberikan dukungan pada AMF. Tindakan tersebut bertolak belakang dengan dukungan yang diberikannya terhadap CMI. Munculnya AMRO sebagai badan pengawas CMIM menjadi tahapan penting dalam mendorong perubahan kerja sama finansial di kawasan Asia. Dalam upaya untuk mendapatkan posisi yang tinggi dalam AMRO Tiongkok harus melewati negosiasi panjang hingga 4 tahun. AMRO berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan dengan cara melakukan pemantauan dan memberikan dukungan terhadap kerja sama finansial yang muncul di kawasan Asia. Namun, hingga 2013 efektivitas AMRO belum dapat dinilai karena jumlah stafnya yang sedikit serta tindakan para ekonominya yang dianggap tidak netral dalam memberikan analisis keuangan serta penilaian politik. Meskipun demikian Tiongkok tetap mengupayakan untuk turut berpartisipasi dalam banyak kegiatan AMRO.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah apa kepentingan Tiongkok dalam AMRO?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta memberikan gambaran mengenai kepentingan Tiongkok dalam AMRO.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum, serta menjadi referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional khususnya dalam memahami kepentingan Tiongkok dalam AMRO.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengambilan tindakan yang terkait dengan kepentingan nasional.

1.6 Studi Pustaka

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan pengkajian terhadap lima literatur yang dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Literatur pertama adalah artikel jurnal yang berjudul *“Insights to Great Powers’ Desire to Establish Institution: Comparison of ADB, AMF, AMRO, and AIIB”* yang ditulis oleh Shintaro Hamanaka pada tahun 2016.²⁰ Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai pembentukan institusi finansial dilihat dari dua sudut pandang. Pertama adalah fase pembentukan atau proses negosiasi, dimana sangat penting untuk menentukan pihak yang akan terlibat di dalamnya. Kedua adalah konfigurasi institusi. Terlepas dari proses pengambilan keputusan yang telah menarik banyak perhatian peneliti, beberapa fitur dari institusi yang berhubungan dengan prestise juga merupakan hal yang penting, seperti lokasi dari kantor pusat organisasi juga perlu diperhatikan.

²⁰ Shintaro Hamanaka, *“Insights to Great Powers: Desire to Establish Institutions: Comparison of ADB, AMF, AMRO and AIIB,” global policy*, volume 7, issue 2 (may 2016)

Kemudian artikel jurnal ini juga menjelaskan mengenai kerja sama keuangan yang terdapat di kawasan Asia, yaitu ADB, AMF, CMIM dan AMRO serta AIIB. Dinamika integrasi keuangan di kawasan Asia ini juga menunjukkan bahwa adanya perubahan kekuasaan. Tiongkok mulai menggeser Jepang menjadi hegemon kawasan terutama dengan pendirian AIIB. Selain itu dalam proses pembentukan institusi regional, negara mulai memberikan batasan pada pihak non-regional untuk terlibat. Hal ini kemudian membuat AS sulit untuk turut serta dalam agenda yang diadakan oleh negara-negara regional.

Pergeseran kekuasaan dari Jepang ke Tiongkok telah mempengaruhi konfigurasi kerja sama finansial di kawasan. Pada tahun 1990 Jepang yang memimpin pembentukan kerangka kerja sama di Asia. Kemudian pada tahun 2000 mulai terlihat keseimbangan antara Jepang dan Tiongkok dengan Tiongkok yang mulai aktif dalam kerja sama di kawasan Asia. Hingga pada akhirnya tahun 2010, dominasi Tiongkok mulai jelas sejak pengajuan proposal AIIB. Persaingan antara Jepang dan Tiongkok terlihat melalui proposal pembentukan AIIB.

Tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian karena peneliti dapat melihat bagaimana pengaruh AS di kawasan Asia. Selain itu kita juga dapat melihat bagaimana peralihan kekuasaan dari Jepang ke Tiongkok. Tulisan ini juga menjelaskan tentang berbagai kerja sama finansial yang muncul di kawasan Asia dan juga menjelaskan mengenai aspek penting dalam menentukan konfigurasi institusi.

Literatur berikutnya adalah *book chapter* yang berjudul “*The Rise of Financial Cooperation in Asia*” yang ditulis oleh William W.Grimes pada tahun

2014.²¹ *Book chapter* ini menjelaskan mengenai perkembangan kerja sama finansial di kawasan Asia terutama setelah krisis finansial 1998 terjadi. Krisis yang terjadi menyebabkan ketidakstabilan keuangan sehingga memerlukan respon regional terhadap fenomena ini. Banyak kerangka lembaga yang kemudian muncul untuk memfasilitasi kerja sama finansial terutama kerangka ASEAN+3 yang mencakup seluruh negara ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kerja sama ini kemudian menginisiasi terbentuknya CMI untuk memberikan dukungan keuangan bagi negara yang terdampak selama krisis. Grimes juga menyoroti sebuah tren kontemporer dalam kerja sama keuangan dengan meningkatkan signifikansi pasar obligasi regional sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan barat.

Tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian ini karena dapat menunjukkan bahwa AMRO, sebagai salah satu hasil institusional utama dari kerja sama ASEAN+3, secara simultan merupakan produk dari sekaligus kendala atas dinamika kekuasaan regional. Ruang lingkup kerja sama keuangan yang terbatas kerja sama yang mengikuti prinsip-prinsip neoliberal namun mengecualikan AS mencerminkan kompromi yang dihasilkan dari rivalitas Tiongkok-Jepang. Wawasan krusial yang ditawarkan Grimes bagi para peneliti adalah bahwa bentuk institusional AMRO itu sendiri merupakan cerminan dari kendala politik yang diberlakukan oleh persaingan Tiongkok-Jepang, yang membantu menjelaskan mengapa AMRO ada sebagai kantor pengawasan dan penelitian daripada sebagai AMF yang sepenuhnya terbentuk sebuah visi yang tetap tidak terwujud justru karena ketidakmampuan dua ekonomi terbesar Asia

²¹ William W. Grimes, "The Rise of Financial Cooperation in Asia," *The Oxford Handbook of the International Relations of Asia* (Oxfordshire, Inggris: Oxford University Press, 2014)

untuk menyepakati struktur tata kelola dan kepemimpinannya. Secara keseluruhan, "The Rise of Financial Cooperation in Asia" tetap menjadi teks fundamental untuk memahami ekonomi politik regionalisme keuangan Asia, dengan penekanannya pada interaksi antara insentif ekonomi dan kendala politik yang menyediakan kerangka analitis yang tahan lama dan terus mempengaruhi literatur kontemporer tentang kerja sama keuangan ASEAN+3, terutama dalam menjelaskan keterbatasan sekaligus signifikansi strategis yang terus berlanjut dari institusi-institusi seperti AMRO dalam arsitektur keuangan regional yang terus berevolusi.

Literatur selanjutnya adalah artikel jurnal yang berjudul "*What to Do with the Chiang Mai Initiative*" yang ditulis oleh Barry Eichengreen pada tahun 2003.²² Eichengreen menjelaskan bahwa pembentukan CMI bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan regional setelah terjadinya krisis finansial 1998. CMI dipercaya dapat mendorong integrasi pasar keuangan dan mampu menciptakan sistem mata uang bersama. Eichengreen menekankan bahwa sumber daya CMI dapat mengembangkan pasar sekuritas sehingga stabilitas keuangan dapat dicapai. Struktur ekonomi Asia yang bersifat heterogen dan memiliki tahap perkembangan yang sangat bervariasi, sehingga untuk mencapai kerja sama yang efektif akan sulit. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dengan situasi tersebut adalah dengan berfokus pada pengembangan kerja sama finansial di kawasan Asia.

Artikel jurnal ini dapat dijadikan sebagai referensi karena menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian di kawasan Asia. selain itu artikel jurnal ini

²² Barry Eichengreen, "What to Do with the Chiang Mai Initiative," *Asian Economic Papers* 2, no. 1 (January 2003)

juga menjelaskan peran dari kerja sama finansial dalam meningkatkan stabilitas ekonomi. Dengan adanya kerja sama finansial negara di kawasan Asia dapat membentuk sistem mata uangnya sendiri.

Literatur keempat adalah “*Institutionalizing Financial Cooperation in East Asia: AMRO and the Future of the Chiang Mai Initiative Multilateralization*” yang ditulis oleh William W. Grimes dan William N. Kring pada tahun 2020.²³ Artikel jurnal memberikan analisis mengenai evolusi CMI menjadi CMIM dalam konteks kestabilan keuangan Asia Timur. Pembentukan ini berdasarkan kurangnya bantuan yang diberikan oleh IMF selama krisis 1998. CMIM muncul sebagai mekanisme keuangan regional dengan dana sebesar \$240 miliar, namun CMIM beroperasi di bawah bayang-bayang IMF. dalam perkembangan CMIM ini dibangun badan pengawas yang kemudian dikenal sebagai AMRO dengan tujuan untuk meningkatkan independensi operasional CMIM dengan cara menyediakan pengawasan dan program yang diperlukan untuk menghadapi krisis yang akan datang. Keberhasilan AMRO dianggap sangat penting agar CMIM dapat berfungsi dengan efektif.

Artikel jurnal ini layak menjadi referensi karna menunjukkan bahwa perdebatan tentang otonomi AMRO dari IMF bukanlah sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan politik yang menyangkut siapa yang memegang kendali atas arsitektur keuangan regional . Bagi Tiongkok, mendorong otonomi AMRO berarti mengurangi pengaruh institusi keuangan internasional yang didominasi AS sebuah langkah strategis dalam melemahkan dominasi dolar AS secara bertahap tanpa konfrontasi langsung, sebagaimana dicatat oleh Wang. Kedua, artikel ini

²³ William W. Grimes and William N. Kring, “Institutionalizing Financial Cooperation in East Asia,” *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations* 26, no. 3 (September 17, 2020)

menegaskan bahwa AMRO berfungsi sebagai *middle layer* yang esensial dalam pengawasan regional, melengkapi pengawasan global IMF dan pengawasan nasional masing-masing negara . Fungsi ini memberikan Tiongkok akses terhadap informasi dan analisis strategis yang menjadi dasar pengambilan keputusan ekonominya di kawasan, sekaligus memperkuat kepentingan ekonominya di ASEAN+3 . Ketiga, temuan Grimes dan Kring bahwa keberhasilan AMRO bergantung pada kepemimpinan dan prioritas politik menyoroti pentingnya rivalitas Tiongkok-Jepang dalam menentukan arah institusi ini di mana posisi co-chairmanship bergilir dan kontribusi sumber daya yang setara (masing-masing 32% dari anggaran) menjadi instrumen bagi kedua negara untuk mempengaruhi agenda dan kepemimpinan AMRO sesuai dengan kepentingan masing-masing

Tinjauan pustaka yang terakhir adalah “*Seeking Influence: China's Diplomacy Toward ASEAN After the Asian Crisis*” yang ditulis oleh Jürgen Haacke pada tahun 2002.²⁴ Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai hubungan Tiongkok dengan ASEAN setelah krisis 1998. Meskipun pengaruh Tiongkok di kawasan ASEAN sudah cukup besar, namun tetap masih jauh jika dibandingkan dengan Jepang dan AS pada masa itu. Perkembangan hubungan Tiongkok dan ASEAN dapat dilihat dari peningkatan perdagangan. Hal ini didorong oleh pembentukan ASEAN+3 yang memfasilitasi diskusi mengenai integrasi ekonomi dan dukungan timbal balik selama krisis keuangan.

Literatur ini layak menjadi referensi untuk memahami motif di balik diplomasi Tiongkok terhadap ASEAN. Melalui analisis rotasi kepemimpinan ASEAN dan Uni Afrika, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Tiongkok

²⁴ Jürgen Haacke, “Seeking Influence: China’s Diplomacy toward ASEAN after the Asian Crisis,” *Asian Perspective* 26, no. 4 (2002).

secara aktif menargetkan negara-negara yang memegang posisi kepemimpinan di organisasi regional, di mana negara-negara yang menjadi Ketua ASEAN menerima komitmen pembiayaan tujuh kali lebih besar dari lembaga pemerintah Tiongkok dibandingkan tahun-tahun non-ketua, setara dengan peningkatan 90 juta dolar AS per proyek. Temuan ini menegaskan bahwa Tiongkok secara strategis menggunakan instrumen ekonomi untuk membangun pengaruh di tingkat regional. Berbeda dengan negara-negara Barat yang cenderung menargetkan pengaruh di organisasi global seperti Dewan Keamanan PBB, Tiongkok lebih memilih untuk membangun pengaruh di organisasi regional di mana dukungan dari negara berkembang dapat memberikan legitimasi bagi citranya sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, sekaligus memungkinkannya membentuk prioritas ekonomi regional agar sejalan dengan kepentingan ekonominya di luar negeri.

1.7 Kerangka Konsep

National Interest

Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional mencakup kebutuhan serta keinginan yang ingin dicapai sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ia juga menjelaskan bahwa kepentingan ini tidak hanya mencakup kepentingan para pemimpin namun juga mencakup kepentingan masyarakat negara.²⁵ Terdapat 4 jenis kepentingan nasional yang dijelaskan oleh Nuechterlein, yaitu:

²⁵ Donald E. Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making," *British Journal of International Studies* 2, no. 3 (October 1976): 248

1) Kepentingan Pertahanan

Kepentingan pertahanan dapat diartikan sebagai kepentingan dalam melindungi negara beserta warganya dari ancaman dari negara lain. Ancaman ini dapat berupa ancaman fisik maupun non-fisik yang bisa datang dari berbagai pihak dan dapat mengganggu stabilitas negara. Dalam kondisi ini negara dapat membuat sebuah kebijakan yang dapat melindungi serta mengembalikan kestabilan negara.

2) Kepentingan Ekonomi

Ekonomi merupakan aspek yang sangat penting di masa sekarang ini. Kepentingan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan perekonomian negara melalui kerja sama dengan negara lain. Dengan melakukan kerja sama negara dapat menjalin relasi dengan negara lain sehingga dapat meningkatkan perdagangan internasional.

3) Kepentingan Tatanan Dunia

Dalam hal ini, kepentingan tatanan dunia dapat dilihat sebagai usaha negara untuk menjaga hubungan atau relasinya dengan negara lain. Selain itu kepentingan tatanan dunia juga berperan dalam menjaga stabilitas politik internasional sehingga perdamaian dunia dapat terjaga.

4) Kepentingan Ideologi

Kepentingan ideologi berperan penting dalam menjaga nilai-nilai yang dijunjung oleh suatu negara. Keberadaan ideologi juga dapat memperkuat kerja sama yang dijalin oleh negara yang memiliki kesamaan ideologi. Ideologi dapat dikatakan sebagai identitas dari sebuah negara dan merupakan pemandu bagi negara dalam menentukan kebijakan yang akan diambil.

Selain mengidentifikasi 4 jenis kepentingan nasional ini, penting untuk memperhatikan intensitas dari kepentingan tersebut. Terdapat 4 tingkat dari intensitas kepentingan nasional, yaitu:

- 1) *Survival Issues* (isu keberlangsungan hidup), merupakan ancaman langsung yang mengancam eksistensi dari suatu negara karena serangan militer.
- 2) *Vital Issues* (isu vital), merupakan ancaman serius yang dihadapi suatu negara dan memerlukan penanganan langsung untuk menghindari kerugian yang besar.
- 3) *Major Issues* (isu utama), merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan politik, ekonomi, maupun ideologi suatu negara.
- 4) *Peripheral Issues* (isu perifer), merupakan permasalahan yang tidak mengancam negara namun dapat mempengaruhi kepentingan individu ataupun perusahaan.

Keempat intensitas kepentingan tersebut kemudian menjadi acuan bagi negara untuk menilai urgensi serta prioritas dalam menanggapi permasalahan internasional.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan kepentingan Tiongkok dalam AMRO menggunakan konsep kepentingan nasional berdasarkan pada pendapat Nuechterlein. Penelitian akan dilakukan dengan mengidentifikasi 4 kepentingan yang telah dijelaskan tersebut, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, serta kepentingan ideologi.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam studi hubungan

internasional, para peneliti menggunakan serangkaian prosedur ini untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam hubungan internasional.²⁶

1.8.1 Pendekatan dan Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan strategi serta teknik analisis data yang tidak memerlukan data numerik. Tujuan dari menggunakan metode ini adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan penelitian menggunakan cara yang mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan sebuah fenomena secara naratif dan di dalamnya juga terdapat analisis terkait fenomena tersebut.²⁷ Peneliti memilih jenis penelitian ini untuk menjelaskan kepentingan Tiongkok dalam ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO).

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kepentingan Tiongkok dalam ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO). Sehingga pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 2010, yaitu pada saat ASEAN *Plus Three Finance Ministers' Meeting* (APT-FMM) diadakan hingga 2016 pada saat AMRO resmi menjadi organisasi internasional.²⁸

²⁶ Mohtar Mas'ud, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990), hal 7.

²⁷ John Creswell and David Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", Sage Publications Inc: United States of America, 2018, hal. 162.

²⁸ William W. Grimes and William N. Kring, "Institutionalizing Financial Cooperation in East Asia," *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations* 26, no. 3 (September 17, 2020) 438.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan unit yang akan menjelaskan mengenai perilaku dari objek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah kepentingan Tiongkok. Peneliti ingin berfokus pada apa kepentingan Tiongkok dalam AMRO. Sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang memiliki dampak terhadap unit analisis yang akan diteliti. Dalam penelitian ini unit eksplanasinya adalah AMRO. Tingkat analisis dari penelitian ini adalah tingkat negara bangsa. Hal ini dikarenakan penelitian ini menjelaskan mengenai kepentingan Tiongkok dalam AMRO yang merupakan sebuah organisasi internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari dokumen asli yang ditulis oleh individu yang memiliki akses langsung pada informasi yang dideskripsikan, ataupun mengalami peristiwa tersebut secara langsung.³⁰ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari dokumen yang dirilis di situs resmi pemerintah. Data primer berupa dokumen resmi didapatkan dari situs resmi pemerintah maupun situs resmi organisasi, seperti situs AMRO (<https://amro-asia.org/>), ADB (<https://www.adb.org/>), IMF (<https://www.imf.org/>) dan Database Peraturan JDIH BPK (<https://peraturan.bpk.go.id/>). Selain data primer ini juga didapatkan dari sosial media dari AMRO seperti akun X @amro_asia, YouTube @amro_asia serta akun FaceBook ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office*.

²⁹ Mohtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal 39.

³⁰ Christopher K. Lamont, *Research Methods in International Relations* (Los Angeles: Sage, 2015): 80.

Data sekunder merupakan data yang ditulis dengan menggunakan referensi dan analisis dari data primer.³¹ Beberapa sumber data yang telah peneliti peroleh diantaranya, artikel jurnal *Insights to Great Powers' Desire to Establish Institution: Comparison of ADB, AMF, AMRO, and AIIB*, book chapter *The Oxford Handbook of the International Relations of Asia* dan artikel jurnal *Institutionalizing Financial Cooperation In East Asia: AMRO and the Future of the Chiang Mai Initiative Multilateralization*, artikel jurnal *Seeking Influence: China's Diplomacy Toward ASEAN After the Asian Crisis*, working paper ADBI *From the Chiang Mai Initiative to an Asian Monetary Fund*, artikel jurnal. Data sekunder berupa pernyataan pemerintah yang yang dirilis oleh portal berita seperti CNN (<https://edition.cnn.com/>), BBC (<https://www.bbc.com/>), China Daily (<https://www.chinadaily.com.cn/>), dan Xinhua (<https://english.news.cn/>).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Terdapat beberapa tahapan yang dibutuhkan dalam menganalisis data, hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis dilakukan untuk mempermudah memahami data yang telah dikumpulkan.³² Dalam analisis data terdapat 5 tahapan yang diperlukan.

1. Menyiapkan dan Mengorganisir Data

Data yang telah dikumpulkan harus dipilih dan disiapkan terlebih dahulu. Pada proses pengorganisir data akan dipisahkan berdasarkan jenisnya, kemudian dapat dilakukan pemindaian dokumen, mengkategorikan data, dan lainnya.

³¹ Christopher K. Lamont, *Research Methods in International Relations* (Los Angeles: Sage, 2015): 80.

³² John Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition* (SAGE Publisher, 2018): 267.

2. Membaca Data

Pada tahapan ini data yang telah disiapkan dan diorganisir akan dibaca dengan tujuan untuk memahami informasi yang terdapat di dalamnya.

3. Pengkodean Data

Pengkodean data bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai informasi yang didapatkan dari data yang dimiliki.

4. Menafsirkan Data

Pada proses ini, data yang telah diberi kode akan ditafsirkan atau dianalisis. Informasi yang telah dimiliki kemudian disusun dan dihubungkan untuk membuat analisis penelitian.

5. Penyajian Data

Data yang telah disusun dan dianalisis tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi untuk membantu pembaca memahami informasi yang terdapat di dalamnya.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1

Pendahuluan

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, pendekatan dan jenis penelitian, batasan penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.



BAB II Sejarah Tiongkok

Bagian ini menjelaskan mengenai kebangkitan Tiongkok hingga dapat menyaingi dominasi Jepang serta peran Tiongkok dalam integrasi keuangan di kawasan Asia.

BAB III Dinamika Integrasi Keuangan Di Kawasan ASEAN+3

Bagian ini menjelaskan perkembangan kerja sama keuangan di kawasan ASEAN+3.

BAB IV Kepentingan Tiongkok Dalam AMRO

Bab ini akan membahas dan menganalisis kepentingan Tiongkok dalam AMRO.

BAB V Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

